

Pengelolaan Anggaran Operasional Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

Bimbingan Teknis Sekretariat Dewan Kabupaten Jepara
Surakarta, 17 Desember 2014



Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id
kumoro@ugm.ac.id

Agenda Paparan

1. Kedudukan DPRD & Pemda: Misi pemerintahan daerah
2. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan
3. Kondisi umum pengelolaan keuangan daerah: profil APBD Kabupaten Jepara
4. Peraturan tentang gaji dan anggaran operasional DPRD
5. Pertanggungjawaban keuangan, kinerja dan akuntabilitas fungsi legislatif.

DPRD < - > Pemda

Setara

- Kedudukan sama
- Seajar
- Tidak saling membawahi

Mitra Kerja

- Sesuai tugas & fungsi masing-masing
- Memelihara & membangun hubungan yg harmonis
- Saling mendukung
- Bukan sebagai “lawan” atau “pesaing”

Kawal & Imbang


- Kualitas
- Produktivitas
- Kinerja

Kinerja DPRD Harus Sesuai Dengan Tujuan Umum Pembangunan Daerah

1. Mengurangi disparitas/ketimpangan pembangunan antar-daerah, antar-strata masyarakat
2. Memberdayakan masyarakat & memberantas kemiskinan
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Meningkatkan pendapatan & kesejahteraan rakyat
5. Mempertahankan kelestarian sumberdaya alam
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Analisis Kepentingan Stakeholders Terkait Anggaran

- **DPRD**
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ mampu mewujudkan kewajiban DPRD)
- **KEPALA DAERAH**
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ visi KDH terwujud)
- **TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH = TAPD**
Bagaimana agar SKPD makin EKONOMIS, EFISIEN tetapi semakin EFEKTIF (3E)
- **SKPD**
Getting money first
- **PIMPINAN KEGIATAN**
Berhemat dan mampu meng-SPJ-kannya
- **MASYARAKAT dan atau POKMAS PEMERHATI / PEDULI**
(Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis, responsif, cepat, relevan, antisipatif, 3E, terjangkau (aksesibilitas), berkualitas, dan lain-lain.



Untuk
mewujudkan
kewajiban
daerah, apakah
kepentingan
dapat
diserasikan?

PERGESERAN POLITIK PENGANGGARAN DAERAH

1. Peran bujeter DPRD sedang mencari bentuk (dari “self-financing” ke “external control”?)
2. PDRB per kapita meningkat, tetapi *horizontal imbalance* juga bertambah parah (DAU lebih bernuansa politis)
3. Peningkatan *tax effort* diantara Pemda Kabupaten/Kota (Masalah: bagaimana daerah memahami kaitannya dengan investasi)
4. Tabungan daerah meningkat (Lewis, 2004). APBN defisit (Rp 61,9 T) tetapi APBD surplus (Rp -43 T), belanja kurang efektif (Depkeu, 2009)
5. Pada tingkat lokal, pemahaman mengenai kaitan antara anggaran dan pelayanan dasar masih sangat rendah.

Pengaturan Keuangan DPRD

Kesetaraan

- Pimpinan & anggota DPRD Prov/Kab/Kota mendapat penghasilan tetap yg sama
- Uang Representasi (UR) ketua DPRD disetarakan dg Gaji Pokok Kepala Daerah

Berjenjang

- Penghasilan berjenjang, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota
- Penghasilan berjenjang Ketua, Wakil Ketua, Anggota

Proporsional

- Penyediaan belanja Penunjang Kegiatan sesuai kompleksitas, permasalahan dan kemampuan keuangan
- Mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasional.

Di mana Posisi Strategis Setwan? (UU 22/2003, PP 21/2007)

Unsur Pendukung DPRD
(Bertanggungjawab kpd
pimpinan DPRD)

Pejabat Perangkat Daerah
memimpin Sekwan
(Secara administratif
dibina Bupati melalui
Sekda)

Tugas Umum:
1. Menyiapkan data &
informasi untuk sidang
DPRD
2. Mengolah aspirasi
masyarakat
3. Mengatur hubungan
dengan media

Tugas Khusus:
1. Menyiapkan RKA-SKPD
2. Meningkatkan peran
struktural-fungsional dlm
mendukung fungsi DPRD

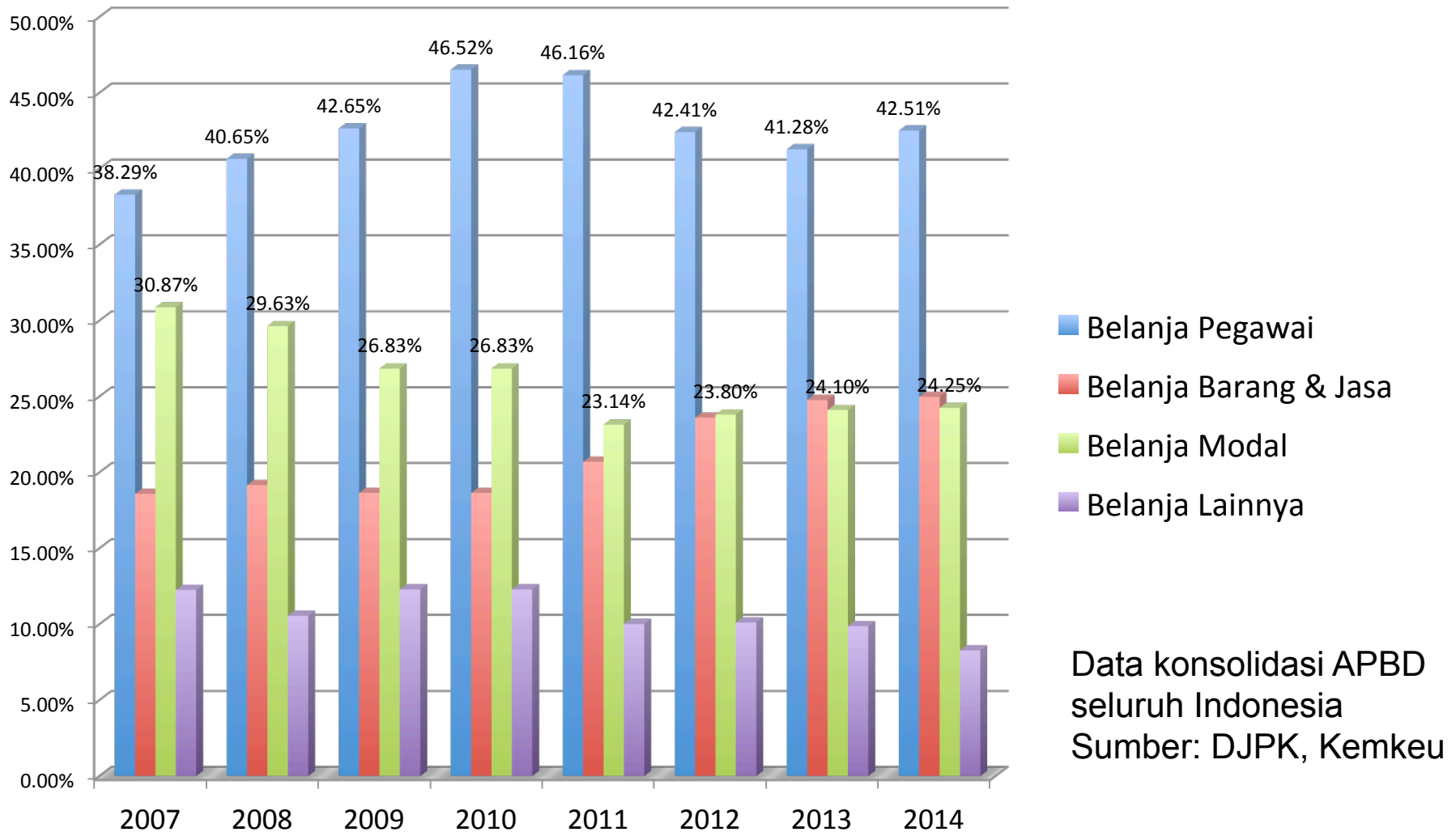
Struktur Organisasi Sekwan



Apa yang Strategis bagi Sekwan?

1. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme
2. Kinerja DPRD dari fungsi Legislasi
3. Kinerja DPRD dari fungsi Pengawasan
4. Kinerja DPRD dari fungsi Penganggaran
5. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan
6. Akuntabilitas / pertanggungjawaban; internal dan kepada publik.

APBD Kurang Pro-Publik



APBD 2014 Kab Jepara

Uraian		Jumlah (jutaan rupiah)	% Total Belanja APBD
Total Pendapatan		1,439,597	92.30
	Pendapatan Asli Daerah	137,545	8.82
	Dana Perimbangan	1,013,014	64.95
	Pajak Daerah	40,852	2.62
	Retribusi Daerah	13,918	0.89
	Lain-lain Pendapatan	73,448	4.71
Total Belanja		1,559,616	100.00
Belanja Tidak Langsung		877,479	56.26
	Belanja pegawai	769,044	49.31
	Hibah	41,240	2.64
	Bantuan sosial	9,272	0.59
	Bantuan keuangan	51,905	3.33
	Belanja tidak terduga	2,000	0.13
Belanja Langsung		682,137	43.74
	Belanja pegawai	21,166	1.36
	Belanja barang & jasa	470,954	30.20
	Belanja modal	190,017	12.18
Pembiayaan Daerah		129,920	8.33
	SiLPA	129,920	8.33
	Pengeluaran	9,901	0.63
Defisit		(120,019)	-7.70

Rujukan Peraturan ttg Keuangan DPRD

- PP No.24/2004 ttg Kedudukan Protokoler & Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
- PP No.37/2005
- PP No.37/2006
- PP No.21/2007

NB: Selalu ada “tambahan” penghasilan dalam revisi PP ttg Keuangan DPRD, kecuali PP 21/2007 yang “mengurangi” DO menjadi BPO Pimpinan DPRD.

Regulasi ttg Keuangan DPRD Sudah Sering Direvisi, Mengapa?

- Terbitnya UU ttg Susduk DPRD
- Terbitnya UU ttg Pemerintahan Daerah (Terbaru: UU No.23/2014 ttg Pemda)
- Perbedaan penafsiran thd PP ttg Keuangan DPRD
- Penyesuaian dg Peraturan Pemerintah ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
- Upaya menyeimbangkan antara imbalan dan kinerja anggota DPRD.

Kilas-Balik Ketentuan Anggaran DPRD

- Terbit PP No.24/2004 → multi tafsir
- Penyempurnaan dg PP No.37/2005 (Nuansa seragam dibatasi, Transparansi & akuntabilitas)
- Terjadi kesenjangan antara DPR & DPRD
- Penyempurnaan dg PP No.37/2006 (Tambah TKI & Ops Pimpinan; Ada perhatian ttg keadilan/berjenjang dg DPR, ada rapel 1 th)
- Demo di mana-mana; gaji DPRD kontras dg rakyat yg masih menderita
- Revisi ketiga: PP No.21/2007 (Hapus rapelan, yg telanjur hrs mengembalikan, pemberian TKI & Ops sesuai tingkat kemampuan daerah)
- Dana Ops dialokasikan pd Setwan dan disediakan setiap bulan → merupakan UYHD
- Azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

Penghasilan Pimpinan & Anggota DPRD

1. Uang Representasi (UR);
 - Tunjangan Keluarga (Istri/Suami & Anak)
 - Tunjangan Beras
2. Uang Paket
3. Tunjangan Jabatan
4. Tunjangan Alat Kelengkapan;
 - Tunj. Komisi
 - Tunj. PanitiaMusyawarah
 - Tunj. Badan Anggaran
 - Tunj. Badan Kehormatan
 - Tunj. Alat Kelengkapan Lainnya
5. Tunjangan Khusus (PPh Pasal 21)

Uang Representasi

Diberikan kpd Pimpinan & Anggota DPRD sesuai Kedudukannya

Jabatan	Provinsi	Kab / Kota
Ketua	Disamakan dg Gaji Pokok Gubernur	Disamakan dg Gaji Pokok Bupati / Walikota
Wakil Ketua	80% dari UR Ketua	80% dari UR Ketua
Anggota	75% dari UR Ketua	75% dari UR Ketua

Selain Uang Representasi, diberikan Tunjangan Keluarga (maks. 14% dari UR masing-masing) dan Tunjangan Beras sesuai dengan ketentuan yg berlaku bagi Pejabat Negara (ps.16)

PPh pasal 21: pajak yg terhutang ditanggung oleh Pemerintah atas beban Keuangan Daerah (APBD) sesuai dg SE Dirjen Pajak No. S-13/PJ.43/2005 tgl 27/01/2005.

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Tunj. Kelengkapan Dewan diberikan kpd Pimpinan dan Anggota DPRD krn kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Komisi, Panitia, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan DPRD Lainnya

Kedudukan	Provinsi	Kabupaten / Kota
Ketua	7,5% dari Tunjab Ketua DPRD	7,5% dari Tunjab Ketua DPRD
Wakil Ketua	5% dari Tunjab Ketua DPRD	5% dari Tunjab Ketua DPRD
Sekretaris	4% dari Tunjab Ketua DPRD	4% dari Tunjab Ketua DPRD
Anggota	3% dari Tunjab Ketua DPRD	3% dari Tunjab Ketua DPRD

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD diberikan sesuai dengan masa kerja Alat Kelengkapan DPRD yang berkenaan.

Tunjangan Badan Kehormatan

Jabatan	Provinsi	Kab / Kota
Ketua	7,5% dari Tunjab Ketua DPRD	7,5% dari Tunjab Ketua DPRD
Wakil Ketua	5% dari Tunjab Ketua DPRD	5% dari Tunjab Ketua DPRD
Anggota	3% dari Tunjab Ketua DPRD	3% dari Tunjab Ketua DPRD

BK dibantu oleh Sekretariat yg secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD (ps.50 ayat 4 PP No.25/2004). Berdasarkan UU No. 23/2014, BK dipilih dari dan oleh anggota DPRD. Tidak ada unsur luar DPRD. Berlaku honor seperti anggota yg lainnya.

Penghasilan Ketua DPRD

No.	Penghasilan	DPRD Provinsi	DPRD Kab / Kota
1	Uang Representasi (Sama dg Gaji Pokok Kdh.)	3.000.000	2.100.000
2	Tunjangan Keluarga: <ul style="list-style-type: none">Tunjangan istri/suami (10% UR)Tunjangan anak (2% UR x 2)	300.000 120.000	210.000 84.000
3	Tunjangan Beras (4 x 10 x Rp 8.000/kg)	320.000	320.000
4	Uang Paket (10 % UR)	300.000	210.000
5	Tunj. Jabatan (145% x UR)	4.350.000	3.045.000
	Jumlah	8.390.000	5.969.000

Penghasilan Anggota DPRD

No	Penghasilan	DPRD Provinsi	DPRD Kab / Kota
1	Uang Representasi (Sama dg Gaji Pokok Kdh.)	2.250.000	1.575.000
2	Tunjangan Keluarga: <ul style="list-style-type: none">• Tunjangan istri/suami (10% UR)• Tunjangan anak (2% UR x 2)	225.000 90.000	157.000 63.000
3	Tunjangan Beras (4 x 10 x Rp 8.000/kg)	320.000	320.000
4	Uang Paket (10 % UR)	225.000	157.000
5	Tunj. Jabatan (145% x UR)	3.262.500	3.283.750
	Jumlah	6.372.500	5.555.750

Kemampuan Keuangan Daerah (PP No.21/2007)

	Provinsi	Kab / Kota
Tingkat kemampuan Keuangan Daerah	(PAD + DBH + DAU) – Belanja Pegawai	PAD + DBH + DAU) – Belanja Pegawai
Kemampuan Tinggi	> 1,5 triliun	> 400 M
Kemampuan Sedang	600 M s.d. 1,5 triliun	200 M s.d. 400 M
Kemampuan Rendah	< 600 M	< 200 M

Pemberian Tunjangan DPRD

	Tunjangan Komunikasi Intensif	Biaya Penunjang Operasional Pimpinan
Kemampuan Tinggi	3 x Uang Representasi	Ketua: 6 X UR Wakil Ketua: 4 X UR
Kemampuan Sedang	2 X UR	Ketua: 4 X UR Wakil Ketua: 2,5 X UR
Kemampuan Rendah	1 X UR	Ketua: 2 X UR Wakil Ketua: 1,5 X UR

Belanja Penunjang Kegiatan

- Disediakan utk mendukung kelancaran tugas, fungsi & wewenang DPRD
- Disusun berdasarkan Rencana Kerja yg ditetapkan Pimpinan DPRD
- Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan:
 1. Rapat-rapat
 2. Kunjungan kerja
 3. Penyiapan Ranperda, pengkajian & telaah Perda
 4. Peningkatan SDM dan profesionalisme
 5. Koordinasi & konsultasi kegiatan pemerintahan & kemasyarakatan.

Pos Belanja DPRD

Ursn Pemerint.: 1.20. Urusan Wajib / Pem. Umum

Kelompok : 5.1 Belanja Tidak Langsung

Jenis : 5.1.1. Belanja Pegawai

Objek : 5.1.1.01. Belanja tetap & tunj. Pimp. & anggota DPRD

Rincian Objek :

01 Uang Representasi

02 Tunjangan Keluarga

03 Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD

06 Tunjangan Beras

07 Tunjangan Khusus (PPh)

10 Uang Paket

11 Tunjangan Panitia Musyawarah

12 Tunjangan Komisi

13 Tunjangan Badan Anggaran

14 Tunjangan Badan Kehormatan

15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

16 Tunjangan Perumahan

17 Uang duka Wafat/Tewas

18 Uang Jasa Pengabdian

Pos Belanja Sekretariat DPRD

Ursn Pemerint. : 1.20. Urusan Wajib / Pem. Umum

Program : Lihat form A VII

Kegiatan : Lihat form A VII

Kelompok : Belanja Langsung

Objek : -

Jenis : Belanja Barang dan Jasa

Rincian Objek :

5.2.2.04.01: Biaya Premi Asuransi Kesehatan Pimp dan Anggota DPRD

5.2.2.12. : Biaya Pakaian Dinas

02: Pakaian Sipil Harian

03: Pakaian Sipil Lengkap

04: Pakaian Dinas Harian.

Semua Jenis Pemotongan Bisa Sensitif

DAFTAR PERINCIAN GAJI		42
ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEPARA		
NAMA	:	Hj. SRI LESTARI
Bagian Bulan	:	APRIL 2012
Penghasilan	:	
1 TKI		3.570.000
2 Tunjangan Perumahan		3.300.000
	Jumlah Penghasilan	<u>6.870.000</u>
Potongan-Potongan :		
1 POT. MUSPIDA	:	100.000
2 POT. TKI PDIP	:	100.000
3 POT. TKI DEMOKRAT	:	-
4 POT PERUM. DEMOKRAT	:	-
5 POT. KOPERASI ke -	:	-
6 POT LAIN- LAIN	:	-
7 KEKURANGAN GAJI	:	4.830.700
	Jumlah Potongan	<u>- 5.030.700</u>
	Jumlah Penerimaan	<u><u>1.839.300</u></u>
Jepara, 2 April 2012 Bendahara Pengeluaran		

Th. 2012: Pemotongan Rp 100 rb untuk Muspida (?)

Bgm legalitasnya?

Tabel 1. Rekapitulasi Produk Perda di Jawa Tengah 1999-2004

No.	Daerah	Kategori							Jumlah
		Kelembagaan	Keuangan	Pajak	Retribusi	Kesehatan	Tenagakerja	Lainnya	
1	Provinsi Jateng	12	13	6	17	3	4	17	72
2	Kota Semarang	7	11	8	9	2	1	8	46
3	Kudus	17	14	2	17	0	1	9	60
4	Pekalongan	17	11	5	12	0	1	5	51
5	Blora	11	7	2	13	1	2	0	36
6	Surakarta	9	14	1	14	2	0	4	44
7	Sragen	23	11	4	28	3	2	11	82
8	Purbalingga	27	15	2	15	2	3	5	69
9	Kebumen	20	10	1	25	2	1	29	88
10	Wonosobo	34	19	4	26	0	2	38	123
11	Cilacap	10	0	6	20	0	1	16	53
	Jumlah	187	125	41	196	15	18	142	724

Sumber: Enny Nurbaningsih et al, *Dinamika Implementasi Perda*, 2006.

“TRIPLE ACCOUNTABILITY” UNTUK KEPALA DAERAH (PP No. 3 tahun 2007)

1. Bupati wajib menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), ditujukan kpd Mendagri melalui Gub;
 1. 26 urusan wajib
 2. 8 urusan pilihan
 3. Urusan desentralisasi
2. Bupati wajib menyusun LKPJ (Lap Keterangan Pertanggungjawaban) untuk DPRD;
 1. LKPJ akhir tahun anggaran
 2. LKPJ akhir masa jabatan
 3. Tidak ada ket diterima/ditolak (?)
3. Bupati wajib memberi Informasi LPPD kepada masy melalui media cetak/elektronik;
 1. Mengapa materinya sama dg LPPD (pasal 27)?
 2. Informasi kepada publik seharusnya selengkap mungkin (berbagai media), tanggapan masy dibuka seluas mungkin.

Bagaimana dengan akuntabilitas anggota DPRD?

Produk Perda Kab Jepara Th 2013

No.	Tanggal Pengesahan	Mengenai
1	30 Mei 2013	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
2	30 Mei 2013	Perubahan atas Perda No.4/2001 ttg Minuman Beralkohol
3	30 Mei 2013	Pencegahan dan pemberantasan pelacuran
4	30 Mei 2013	Penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji
5	30 Mei 2013	Penyertaan modal daerah pada BUMD tahun 2013-2017
6	?	?
7	8 Juli 2013	Perubahan atas Perda No.17/2010 ttg Tata-kerja Dinas Daerah
8	17 Juli 2013	Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga-kerja asing
9	17 Juli 2013	Perubahan atas Perda No.10/2010 ttg pelayanan pasar
10	6 Sept 2013	Penanggulangan penyakit HIV dan AIDS
11	6 Sept 2013	Perubahan atas Perda No.10/2006 ttg Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
12	6 Sept 2013	Tanda Daftar Gudang
13	6 Sept 2013	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Modus Korupsi APBD

1. Penggelapan anggaran; mengambil pos anggaran lain dg maksud “menyembunyikan” pos yg mencolok & tidak rasional
2. Menciptakan anggaran baru yg tdk diatur PP 21/2007 ttg Kedudukan Keuangan DPRD
3. *Mark-up* (penggelembungan) anggaran
4. Alokasi anggaran kembar
5. Anggaran tanpa rincian
6. Menghilangkan pos anggaran
7. Pengambilalihan anggaran yg seharusnya diberikan dlm bentuk jaminan asuransi, diambil sbg uang *cash*.

Sumber: ICW, 2007

Permasalahan Keuangan DPRD

- Penghasilan pimpinan & anggota: 10 jenis (uang representasi, t.keluarga, t.beras, u.paket, t.jabatan, t.Pamus, t.Komisi, t.Panggar, t.BK, t.alat kelengkapan lain). Di luar itu tidak ada tambahan.
- TKI (Tunj.Komunikasi Intensif) utk mendorong kinerja DPRD. Kinerja hendaknya dapat dipertanggungjawabkan.
- BPOP (Belanja Penunjang Operasional Pimpinan) utk kegiatan representasi, pelayanan & pelaksanaan tugas pimpinan DPRD.
- LPJ atas dana TKI termasuk objek pemeriksaan BPK. Jika penggunaannya menyimpang, dapat dikenai unsur pidana korupsi.
- Masih ada ketidakjelasan aturan keuangan. Mis: BPOP tdk boleh untuk pembayaran tunj.representasi, tetapi BPOP yg masuk belanja penunjang kegiatan dapat digunakan untuk tunjangan representasi. Bagaimana pemecahannya?

Analisis Opini Pakar

- **Akademisi Jogja (Hariadi, 2010):**
 - Benarkah PP 37/2006 “merongrong otonomi daerah”?
 - Bertentangan dengan UUD 1945?
 - Memenuhi unsur tindak-pidana korupsi, merugikan negara, memperkaya diri-sendiri dan orang lain, melawan hukum?
- **Eko Prasajo (Kompas, 2 Feb 2007):**
 - Apakah DPRD itu pekerja?
 - DPRD bukan tempat cari nafkah
 - Demokrasi lokal di Jerman: anggota parlemen daerah adalah sebuah kehormatan, dilaksanakan tanpa pamrih
 - Membahas 1 Perda maksimal 6 kali rapat
 - Dana TKI ternyata utk memelihara hubungan kesetiaan konstituen, bukan untuk rakyat umum.
- **Wahyudi Kumorotomo (21 Mar 2014):**
 - Biaya politik & demokrasi di Indonesia terlalu besar
 - Produktivitas legislasi masih rendah
 - Dana Rp 11,8 T utk DPR, utk 37,2 orang miskin melalui PNPM Mandiri hanya Rp 11,4 T.
 - Akuntabilitas anggaran Pemda masih rendah; tidak langsung terkait kesejahteraan rakyat.

PENUTUP

- Sekwan adalah mitra strategis yang menjembatani unsur Legislatif dan Eksekutif di Daerah.
- Pengelolaan keuangan DPRD hendaknya dilakukan secara cermat, berdasarkan peraturan perundangan yg berlaku, sesuai harapan rakyat di daerah
- Setwan perlu peningkatan kemampuan, profesionalisme, dan tanggungjawab sehingga keuangan Dewan memenuhi akuntabilitas publik.

TERIMA KASIH